

**POLA KOMUNIKASI PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA DI  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DAN KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH  
LAPORAN PENELITIAN**



ABDUL ROZAK

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2022

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan peneltain kluster penelitian berbasis komunitas berjudul “Pola Komunikasi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah”. Laporan ini disusun sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban penulis sebagai bagian dari sivitas akademika di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan laporan ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Al. Makin, Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Prof. Dr. Marhumah, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Muhrisun, Ph.D., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kebumen yang sudah berkenan menerima kami sekaligus sebagai narasumber dalam penelitian ini.
5. Semua tenaga kependidikan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga yang membantu urusan administrasi.
6. Kolega dan pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu atas bantuan dan dorongannya untuk menyelesaikan laporan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu masukan dan saran konstruktif sangat membantu agar lebih baik di masa mendatang. Semoga Allah SWT. memberikan ridho dan anugerah-Nya hingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Yogyakarta, 26 Desember 2022

Ketua Peneliti

Abdul Rozak

## **ABSTRAK**

Tingginya kasus intoleransi beragama disertai dengan kekerasan, telah terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar agama dan mengganggu interaksi masyarakat dalam kehidupan beragama. Fenomena tersebut mendorong Kementerian Agama menetapkan kebijakan dan melakukan langkah-langkah kongkret dalam menerapkan konsep moderasi beragama, guna mencegah meluasnya kasus intoleransi. Hal yang sama juga dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Riset ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi dalam pengarusutamaan moderasi beragama di kedua Propinsi tersebut yang direpresentasikan oleh Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kebumen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, observasi langsung dilapangan, wawancara disertai focus grup diskusi kepada pejabat Kementerian Agama, tokoh agama, dan para penyuluh agama Islam di kedua lokasi sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan moderasi beragama .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Provinsi DIY dan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah telah mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama melalui tiga bentuk: sosialisasi, institusionalisasi, dan evaluasi kegiatan. Selanjutnya, studi ini menemukan bahwa pola komunikasi yang dikembangkan dalam pengarusutamaan moderasi beragama relatif sama, yaitu berpusat pada pimpinan formal dan tokoh agama di masyarakat.

Kata Kunci: Pola komunikasi, pengarusutamaan, moderasi beragama

## Abstracts

The high number of cases of religious intolerance accompanied by violence that has occurred in the last 5 years has caused disharmony in interfaith relations to disrupt people's interactions in religious life. This phenomenon prompted the ministry of religious affairs to establish policies and take concrete steps to implement religious moderation to prevent widespread cases of intolerance. The same thing is also done in the Provinces of the Special Region of Yogyakarta and Central Java. This research is one of the efforts to find out how communication patterns in mainstreaming religious moderation in the two provinces represented by Gunung Kidul Regency and Kebumen Regency. The research uses a qualitative approach. Data was collected through documentation techniques, direct observation in the field, interviews, and focus group discussions with Ministry of Religious Affairs officials, religious leaders, and Islamic extension workers in both locations as the spearhead in socializing religious moderation. The results showed that the Office of the Ministry of Religious Affairs of DIY Province and Kebumen Regency of Central Java has implemented a policy of religious moderation through three forms: socialization, institutionalization, and evaluation of activities. Furthermore, the study found that the communication patterns developed in mainstreaming religious moderation were relatively similar, centered on formal leaders and religious leaders in the community.

Keywords: Communication patterns, mainstreaming, religious moderation

HALAMAN		JUDUL
.....		i
PRAKATA		
.....		ii
ABSTRAK		
.....		iii
ABSTRACTS		
.....		iv
DAFTAR		ISI
.....		v
BAB	I.	PENDAHULUAN
.....		1
A. Latar		Belakang
.....		1
B. Rumusan		Masalah
.....		7
C. Kajian		Pustaka
.....		7
BAB	II.	LANDASAN
TEORI.....		14
BAB	III.	METODE
		PENELITIAN
.....		18

BAB	IV.	HASIL	DAN	PEMBAHASAN
.....				23

BAB	V.	KESIMPULAN	DAN	SARAN
.....				28

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Prinsip-prinsip dasar komunikasi (persuasif dan linguistik) dakwah Islam dalam al-Qur'an idealnya dilaksanakan secara konsisten melalui media apa saja terutama media sosial, maka hubungan antar manusia akan mengalami ketentraman dan kedamaian, bukan justru perpecahan dan tindak kekerasan (*violence*) (Douglas dan Frances Chaput Waksler, 2002 : 11-42), yang sering terjadi selama ini. Hal ini senada dengan apa yang telah disyaratkan oleh Nabi Muhammad saw, yang telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip *komunikasi dakwah nubuwwah* dalam sebuah arti sabdanya, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat:

“Muslim yang baik adalah jika muslim lain merasa tentram dari perkataan (*qaul*) dan perbuatannya.” (Rahmat, 1994 : 35-36).

Integrasi interkoneksi antara ilmu komunikasi dengan Agama Islam menjadi komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan dan keselamatan (Hefni, 2017 : 14). Komunikasi Islam sangat penting karena terkait dengan dakwah Islam. Dakwah adalah praktik komunikasi, namun tidak semua praktik komunikasi dapat disebut dakwah. (Syahputra, 2007 : 216). Al-Qur’an–komunikasi linguistik–sendiri, sebagai sumber inspirasi utama ilmu komunikasi, adalah kitab suci yang banyak berisi kajian seputar komunikasi, pemberi informasi, penerima informasi, materi informasi, serta berbagai macam metode dan cara berkomunikasi (Rahman, 2007 : 1). Prinsip-prinsip komunikasi linguistik yang terdapat dalam al-Qur’an sering dijumpai dalam bentukbentuk verbalistik, seperti istilah *kalam* (*parole*), *qaul* (*speech*), *lisan* (*langue*), *wahyu*, *lughah* dan sebagainya.

Di sisi lain, al-Qur’an juga telah menampilkan prinsip-prinsip dakwah yang terkandung di dalam ayat-ayatnya, yang bertujuan untuk *amr ma’ruf* (*humanisasi*) dan *nahi munkar* (*liberasi*). Dengan demikian terjadi hubungan koneksitas antara prinsip-prinsip (ilmu) komunikasi [persuasif dan linguistik (Islam)] dan prinsip-prinsip (ilmu) dakwah. Prinsip-prinsip *komunikasi (persuasif dan linguistik) dakwah* dalam al-Qur’an telah mengajarkan prinsip-prinsip komunikatif qur’ani dalam metode dakwah. Inilah yang *seharusnya (das sein)* diterapkan. Namun *senyatanya (das sollen)*, masih banyak para *da’i* (komunikator) dalam berdakwah, tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip komunikasi persuasif dan komunikasi linguistik qur’ani sebagaimana yang telah disarankan oleh al-Qur’an tersebut, terutama terkait dengan tidak dipertimbangkannya nilai-nilai universal, seperti nilai humanisasi ( *amr ma’ruf*), liberasi (*nahi munkar*), dan transendensi (*tu’minu na billah*) dalam Ilmu Sosial Profetik (ISP) (Kuntowijoyo, 2007 : 99).

Beberapa para *da’i* sebagai komunikator, berdakwahnya dengan mengabaikan prinsip-prinsip humanisasi, liberasi, dan transendensi (Muhiddin, 2002 : 10). Pengabaian terhadap prinsip humanisme (*qaulan maisura*), misalnya, dengan merendahkan *audiens*, menghina, mengolok-olok, dan yang pasti tidak memanusiakan manusia. Pengabaian terhadap prinsip liberasi (*qaulan layyina*), misalnya, dengan melakukan doktrinasi sepihak, bahwa yang ini benar dan yang lain salah. Pengabaian terhadap prinsip ini dapat

memunculkan sikap eksklusivisme (tertutup). Pengabaian terhadap prinsip transendensi (*qaulan 'az}i>ma*), misalnya, dengan mengabaikan aspek-aspek spiritual atau sufistik dalam berdakwah, yang pada ujungnya dapat mengabaikan aspek-aspek etika dalam dakwah (Muhiddin, 2002 : 10).

Sebagai contoh tayangan video di media sosial youtube dengan link [https://www.youtube.com/results?search\\_query=dakwah+di+yogya+dengan+mencaci+maki](https://www.youtube.com/results?search_query=dakwah+di+yogya+dengan+mencaci+maki) dengan judul : dakwah isinya teriak" menghina || hukum menghina pemimpin...!! Kalau tidak suka ya tutup telinga, dan [https://www.youtube.com/watch?v=xubku\\_f085y](https://www.youtube.com/watch?v=xubku_f085y) yang berjudul : Prabowo Kalah, Gus Nur Makin Gila Dan Gus Dewa Menasehatinya, terlihat da'i atau ustadz disaksikan mad'u atau jamaahnya dalam ceramahnya merendahkan salah satu kontestan pilihan presiden 2019, menghina, mengolok-olok, dan yang pasti tidak memanusiakan manusia. Selain itu ada narasi yang dibangun memperlihatkan pengabaian terhadap prinsip liberasi (*qaulan layyina*), yakni dengan melakukan doktrinasi sepihak, bahwa yang ini benar dan yang lain salah, hal ini menandakan adanya *gap* atau jarak ideal antara komunikasi Islam yang harusnya dipraktikkan para da'i atau ustadz dengan realitas dakwah di masyarakat, sehingga posisi moderasi dalam beragama jauh dari pengamalannya.

Dakwah melalui internet sebagai bentuk media baru (*new media*) merupakan proses komunikasi yang meningkatkan interaktifitas dan konektifitas antar manusia. Media baru yang menjadi fenomena di Indonesia adalah media sosial (*social media*) dengan peningkatan pengguna yang sangat signifikan. Data Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia (APJII) per Januari 2016 menyebutkan bahwa terdapat 79 juta pengguna media sosial di Indonesia, seperti *facebook* (FB), *instagram* (IG), *line*, *telegram*, dan *whatsapp* (WA) (Musyafak dan Hasan Asy'ari Ulama'i, 2020 : 2).

Kenyataan yang terlihat di masyarakat terdapat oknum komunikator dakwah Islam (da'i atau ustadz) yang berdakwah di media sosial dengan cara yang tidak Islami bahkan mengabaikan prinsip-prinsip humanisasi, liberasi, dan transendensi. Hal ini nampak di beberapa media sosial, terdapat oknum da'i atau ustadz yang mengungkapkan ekspresi emosi negatif dengan meningkatkan intensitas ujaran kebencian (*hate speech*) dan sebaran berita *hoax*. Dakwah dengan kata-kata yang kasar, profokatif mampu menggiring pemirsa atau pendengarnya terpengaruh oleh ujaran kebencian sebagai bentuk dari sikap intoleran, *unlike*,



ketidaksukaan pada masyarakat lain dan ini jauh dari nilai moderasi dalam beragama (Musyafak dan Hasan Asy'ari Ulama'i, 2020 : 5).

Melihat beberapa tahun kebelakang, kasus-kasus intoleransi dalam beragama dengan menggunakan kekerasan terjadi di Indonesia. Sebagai contoh kasus intoleransi di Solo raya. Secara sosiologis, Solo Raya dikenal sebagai “sumbu pendek” karena memiliki akar konflik yang panjang dari masa ke masa, bahkan siklusnya terjadi setiap dua dasawarsa (Musyafak dan Lulu Choirun Nisa, 2020 : 95).

Terdapat kelompok di Solo Raya yang dikenal sebagai basis gerakan Islam garis keras yang berfaham intoleran radikal. Kelompok tersebut suka menggunakan kekerasan (*violence approach*) dalam menyikap suatu permasalahan sosial keagamaan di daerah Solo raya apabila dianggap kelompok mereka melanggar aturan agama Islam. Termasuk adanya kasus kekerasan yang dilatarbelakangi perbedaan keyakinan agama dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) terhadap aktivis LSM Insan Emas pada Juni 2007. FPI dan LUIS membubarkan paksa acara seminar dan dialog antar umat beragama dengan cara kekerasan fisik dan intimidasi. Pembubaran tersebut oleh FPI dan LUIS karena dianggap LSM Insan Emas menyebarkan paham pluralisme yang diharamkan oleh fatwa MUI. Tahun 2009 kembali terjadi pembubaran paksa oleh dua laskar ini pada acara bedah buku “Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam” yang diselenggarakan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS UMS) (Najahan Musyafak dan Lulu Choirun Nisa, 2020 : 97).

Setelah peristiwa di Solo raya pada tahun 2006 dan 2009, pada tahun 2011, Wahid Institute mencatat terdapat 92 kasus kekerasan atas nama agama. Angka ini meningkat 18.0% dari tahun 2010 yang hanya 62 kasus. Riset yang dilakukan Yayasan Denny JA & Lembaga Survey Indonesia (LSI) Community pada tahun 2012 mengenai meningkatnya populasi yang tidak nyaman dengan keberagaman menemukan adanya peningkatan rasa ketidaknyamanan masyarakat yang cukup signifikan ketika hidup berdampingan dengan orang yang berbeda latar agama, terdapat kenaikan 8,2% dari 6,9% pada survey tahun 2005 menjadi 15,1% pada survey. Ironisnya, penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menegakkan prinsip terhadap orang yang berbeda agama juga mengalami peningkatan. Terdapat 24% publik setuju dan membenarkan penggunaan kekerasan dalam menegakkan prinsip agama, angka tersebut meningkat dari tahun 2005 yang hanya di bawah 10%.

**Tabel 1**

**Penolakan Mempunyai Tetangga Beda Agama**

<b>Survey</b>	<b>2005</b>	<b>2012</b>	<b>% Kenaikan</b>
Bapak/Ibu yang menolak mempunyai tetangga beda agama	8.2%	15.1%	6.9%

Sumber: Yayasan Denny JA dan LSI Community tahun 2012.

**Tabel 2**

**Sikap Penggunaan Kekerasan Dalam Menegakkan Prinsip Agama**

<b>Survey</b>	<b>2005</b>	<b>2012</b>	<b>% Kenaikan</b>
Menggunakan kekerasan sebagai salah satu cara dalam menegakkan prinsip agama	9,8%	24%	14,2%
Tidak menggunakan kekerasan dalam menegakkan prinsip agama	79%	59,3%	-19,7%
Tidak tahu/tidak menjawab	11%	16,7%	5,5%

Sumber: Yayasan Denny JA dan LSI Community tahun 2012.

Komisioner Komnas HAM, Siti Noor Laela menyatakan, dalam kasus penyerangan tersebut kelompok penyerang dan yang diserang bertetangga dan teman bermain waktu kecil. Aksi penyerangan oleh tetangga dan teman bermain waktu kecil, dapat menjadi indikator tentang toleransi di Yogyakarta yang berkurang.

"Intoleransi di Yogya sudah diambang batas, sehingga harus betul-betul menjadi perhatian Pemda dan aparat penegak hukum," kata Siti di Balck Canyon Coffe, Babarsari, Sleman, Jumat 30 Mei 2014.

Pemberitaan mengenai intoleransi dalam beragama di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 tahun terakhir, dari 2014 sampai dengan 2019 dengan judul : Intoleransi di Yogyakarta Meningkat 5 Tahun Terakhir, Kata Setara (Baca selengkapnya di artikel "Intoleransi di Yogyakarta Meningkat 5 Tahun Terakhir, Kata Setara", <https://tirto.id/emig>) sebagai berikut :

Hasil penelitian LSM yang fokus mengadvokasi demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia Setara Institute menyimpulkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah 10 besar provinsi dengan jumlah kasus kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) tertinggi di Indonesia. "DIY menempati posisi enam dengan jumlah kasus 37," kata Direktur Riset Setara Institute Halili saat dihubungi reporter Tirto

(<https://tirto.id/intoleransi-di-yogyakarta-meningkat-5-tahun-terakhir-kata-setara-emig>, diakses 01 Oktober 2021 pukul 20.10 wib).

Penelitian yang dilakukan Setara menggunakan metode campuran, yakni kualitatif dan kuantitatif, dengan mengombinasikan desk study dan field study. Pengumpulan data dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus para peneliti atau peer discussion; wawancara mendalam dengan berbagai otoritas negara, tokoh, minoritas, dan kelompok korban. Kemudian analisis dokumen dan pemberitaan media, 9 provinsi dengan kasus pelanggaran kasus kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi dalam lima tahun terakhir atau saat periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Sembilan provinsi dengan kasus pelanggaran kasus kebebasan beragama/berkeyakinan

No	Propinsi	Jumlah kasus pelanggaran
1	Jawa Barat	162
2	DKI Jakarta	113

3	Jawa Timur	98
4	Jawa Tengah	66
5	Aceh	65
6	DI Yogyakarta	37
7	Banten	36
8	Sumatera Utara	28
9	Sulawesi Selatan	27
Total kasus		632

Sumber : <https://tirto.id/emig>

Kabupaten Gunungkidul di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang di Jawa tengah menjadi fokus penelitian karena dari hasil riset tersebut diatas dan pemberitaan media nasional memperlihatkan intoleransi yang tinggi dan membahayakan buat kerukunan antar umat beragama.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi program moderasi beragama di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pola komunikasi yang diterapkan dalam pengarusutamaan program moderasi beragama di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah?

### C. KAJIAN PUSTAKA

*Pertama, Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam.* Tulisan makalah dalam sebuah jurnal terkenal ini menjelaskan Moderasi Islam dengan mengutip Yusuf Al-Qaradhawi adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil jalan tengah dari dua sikap yang berseberangan atau berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran seseorang. Dengan kata lain seorang muslim moderat akan selalu memberi nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya (Amin, 2014 : 24). Di dalam kata moderat terkandung makna objektivitas dan wajar. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, moderasi mengandung arti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah, dan moralitas. Ini berarti bahwa Islam adalah agama yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrim pada keyakinan tidak angkuh atau lemah lembut dan lain-lain (Amin, 2014 : 25).

Melihat fenomena yang berkembang saat ini, bisa jadi kita terkejut. Bagaimana mungkin di Indonesia paham radikal mendapat tempat di nusantara dan berkembang sedemikian rupa. Padahal sejak awal kedatangannya ke Indonesia, Islam telah tampil dengan keramahannya. Islam disebarkan dengan cara damai, tidak ada pemaksaan kepada penduduk satu wilayah untuk memeluk Islam. Bahkan dalam kasus tertentu, Islam diterima setelah Islam berdialog bahkan dalam waktu panjang dengan tokoh atau ketua adat di wilayah tertentu. Bahkan yang sangat menarik adalah, pada saat Islam masuk terlepas dari budaya yang dibawanya, apakah Arab, Gujarat atau India, budaya itu tidak dipaksakan pula dengan penduduk setempat. Bahkan dalam tingkat tertentu, Islam dapat berdialog dengan budaya lokal. Adakalanya Islam menolaknya dengan lembut karena bertentangan dengan akidah, namun banyak diterima dan diakomodasi karena secara prinsip sama sekali tidak bertentangan dengan nilai dasar ajaran Islam. Contoh yang sering dikembangkan adalah bagaimana strategi yang diterapkan Walisongo dalam rangka pembumian Islam di nusantara.

*Kedua, Di dalam artikelnya yang berjudul, The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study its Implementation in Malaysia, Mohd Shukri Hanafi mentabulasi para mufassir dalam konteks pemaknaan kata ummatan washta*

sebagaimana yang tercantum pada ayat di atas. Ia mengutip Al-Thabary, Ibn Kathir, AlQurthuby, Al-Razy Al-Nafasy, Al-Zamakhshary, Al-Mahally dan Al-Suyuthi, Qutb, Hijazi, dan Al-Zuhaily.

Para mufassir tersebut menterjemahkan *washata* sebagai, *the chosen, the best, the fair, most humble and being fair*. Bahkan Al-Razy memberi makna yang lebih panjang. Menurutnya ada empat makna dasar dari kata *wasata*. *First, fair meaning not to take sides between two conflicting parties. Second, something that is the best. Third, the most humble and perfect. Fourth, is not to be extreme in religious matters* (Hanafi, 2014 : 53). Sedangkan Al-Zuhaily memberi makna, *it means being fair, obedient to the teachings of Islam and not to be extreme to their end in religious and worldly affairs*.

*Ketiga, NU dalam Persinggungan Ideologi: Menimbang Ulang Moderasi Keislaman Nahdatul Ulama*. Tulisan makalah dalam sebuah jurnal terkenal ini menjelaskan dalam pemikiran keagamaan, juga dikembangkan keseimbangan (jalan tengah) antara penggunaan wahyu (naqliyah) dan rasio ('aqliyah) sehingga dimungkinkan dapat terjadi akomodatif terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan doktrin-doktrin yang dogmatis. Masih sebagai konsekuensinya terhadap sikap moderat, Ahlussunah waljamaah juga memiliki sikap yang lebih toleran terhadap tradisi memiliki makna penting dalam kehidupan keagamaan. Suatu tradisi tidak langsung dihapus seluruhnya, tetapi berusaha secara bertahap di-Islamisasi (diisi dengan nilai-nilai Islam). Dikatakan pula, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU selama ini memainkan peran yang signifikan dalam mengusung ide-ide keislaman yang toleran dan damai (Hamid, 2007 : 28).

*Keempat, Report of The Study on Pattern of Process in Promoting Teacher and School Participation for Prevention and Solution of Problems Concerning Child Labor in Thailand*. Tulisan makalah dalam sebuah jurnal terkenal ini menjelaskan kearifan lokal adalah pengetahuan dasar yang didapat dari kehidupan yang selaras dengan alam. Kearifan lokal juga berarti seperangkat gagasan atau kebijaksanaan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang ditemukan di masyarakat dan sering dipraktikkan sebagai petunjuk hidup serta diwariskan secara turun-temurun (Tap, 1996 : 176). Dalam arti lain, kearifan lokal adalah juga gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bijaksana, penuh kearifan yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Dari pengertian kearifan lokal tersebut, ia sebenarnya ada dan begitu dekat dengan manusia yang dalam banyak aktivitas hidupnya selalu menjadi panduan, terutama dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kearifan-kearifan lokal berperan dalam kerukunan, kedamaian, dan persatuan masyarakat. Kearifan lokal mengikat norma-norma interaksi antara masyarakat-masyarakat yang ada. Dalam Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Dengan demikian, *local wisdom* atau *indigeneous wisdom* adalah ‘kearifan Tuhan’ atau fitrah yang tertanam di dalam hati manusia yang berakal. Terdapat hadis *istafti qalbaka* (mintalah fatwa/pendapat pada hatimu), ini menunjukkan bahwa di dalam hati ada kearifan-kearifan fitriyah yang bisa dimintai pendapat dan secara jujur akan mengarahkan pada pilihan-pilihan moral. Hati Nurani, memang, seringkali tercermin dalam kearifan-kearifan lokal dan selalu menjadi *guidance* dalam ‘ketersesatan’. Ibn Taymiyah pernah menyebut bahwa ada dua fitrah: *al fitrah al majbubah* dan *al fitrah al munazzalah*. Yang disebut pertama adalah fitrah yang sudah tertanam secara naluriah di dalam hati manusia. Manusia selalu memiliki pilihan-pilihan moral kebajikan yang dikenal dengan istilah *al hanafiyat al samahah* (kecenderungan kepada lapang dada atau kebaikan). Sedangkan yang disebut kedua berarti fitrah yang diturunkan (*munazzalah*) melalui wahyu Allah kepada para rasul-Nya. Fitrah yang sudah tertanam di dalam hati (*al fitrah al munazzalah*) sering merupakan nilai-nilai kearifan yang didapat dari kebajikan-kebajikan turun-temurun secara tradisional dan secara purba.

*Kelima, Mengusung Moderasi Islam dalam Masyarakat Multikultural*. Tulisan makalah dalam sebuah jurnal terkenal ini menjelaskan kata moderasi Islam tidak terlalu familiar dalam diskursus pemikiran keagamaan Islam klasik. Namun esensi istilah moderasi itu sendiri merupakan pengejawantahan dari ajaran universal Islam (Darlis, 2017 : 225-255) dan memiliki akar yang jelas dalam Alquran dan Sunnah. Dalam kamus bahasa Inggris kata moderat memiliki arti, yaitu 1) *not extreme*; 2) *of or having (political) opinions that are not extreme*; 3) *keeping or kept within limits that are excessive*. Sementara dalam bahasa Arab kata tersebut dapat ditemukan dalam istilah bahasa Arab seperti *al-wasat* atau *tawassut* (moderasi), *tasamuh* (tolerance) *al-qisth* (justice), *al-tawazun* (fairness), *al-itidal* (harmony).

Berdasarkan pengertian di atas, Darlis, Rauf, al-Qaradhwi mengatakan bahwa orang moderat adalah orang yang senantiasa mampu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam tiap langkah dan perkataan di tengah pluralitas masyarakat sehingga tercipta kedamaian dan toleransi tanpa ada tindakan anarkisme dan eksklusivisme. Berbeda dengan pandangan di atas, Muchlis M. Hanafi memaknai moderat (*al-wasat*) sebagai metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku secara *tawâzun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan, sehingga ditemukan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah dan akhlak.

*Keenam, "Al-Tawassut wa-I'tidal: the NU and Moderatism in Indonesian Islam.* Tulisan makalah dalam sebuah jurnal terkenal ini menjelaskan terlepas dari berbagai macam pandangan tentang Islam Moderat, satu hal yang pasti bahwa, Islam moderat adalah ajaran yang genuin (asli) dari Alquran yang sangat mendesak untuk dibumikan dalam konteks berbangsa dan bernegara dewasa ini. Hal itu melihat arus pemikiran keagamaan yang sangat deras baik dari Barat yang liberal maupun dari Arab yang literal. Dalam hal ini, Islam Indonesia harus menuguhkan kembali Islam yang khas, yang telah diperkenalkan oleh para ulama (*wali*) terdahulu yang sangat paham tidak hanya persoalan keagamaan, tapi juga bijak dalam mendaratkan ajaran Alquran di nusantara, yaitu Islam Moderat.

Dengan demikian Islam moderat dapat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal (*tawassut*) di dalam mengimplementasikan ajaran agama; toleransi terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, memprioritaskan dialog, mengakomodir konsep-konsep modern yang secara substansial mengandung maslahat, berpikir rasional berdasarkan wahyu, menafsirkan teks secara kontekstual, dan menggunakan *ijtihad* di dalam menafsirkan apa yang tidak termaktub di dalam alQur'ân atau Sunnah. Dengan karakter ini, Islam moderat adalah mereka yang memiliki sikap toleran, rukun dan kooperatif dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda. Inilah watak rahmah bagi Islam moderat di Indonesia, yang lebih bermakna teologis, daripada politis yang sering diwacanakan oleh Amerika Serikat ketika memaknai Islam moderat (Burhani, 2012: 564-581).



*Ketujuh, Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamantion on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU.* Tulisan makalah dalam sebuah jurnal terkenal ini menjelaskan beberapa akademisi menegaskan bahwa konsep moderasi Islam dalam konteks keberagaman di Indonesia setidaknya memiliki beberapa karakteristik yang khas antara lain; “(1) *nonviolent ideology in propagating Islam*; (2) *adopting in modern way if life with its all derivates, including science and technology, democracy, human rights*; (3) *the use of rational way of thinking*; (4) *contextual approach in understanding Islam*; (5) *the use of Ijtihad (intellectual exercise to make a legal opinon in case og the absence of explicit justification from the Qur'an and Hadith* (Hilmy, 2013 : 24-48).

Hanya saja, posisi di tengah memang seringkali mengandung ambiguitas dan ketidakjelasan tafsir. Posisi semacam inilah yang seringkali dikritik oleh berbagai kalangan, terutama oleh kaum radikal, perihal ambiguitas posisi kaum moderat. Mereka mengolok-olok kaum moderat sebagai “*la-wala*” (bukan-bukan), yakni bukan Timur dan bukan Barat, bukan tekstualis dan bukan kentekstualis, bukan radikal dan bukan liberalis. Pertanyaan yang mereka lontarkan adalah, jika bukan kedua-duanya, lantas apa? Bagaimana formulasi yang tepat bagi posisi moderat? Posisi semacam ini, menurut para pengkritik, tidak merefleksikan kejelasan dan otoritas keberagamaan yang sah dan meyakinkan

*Kedelapan, Lembaga Interfaith di Indonesia : Studi Kritis Pendekatan Formalistik Negara Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama* (Mantu, 2016 : 57). Tulisan makalah dalam sebuah jurnal terkenal ini menjelaskan periode tahun 1945 - 1967 semakin banyak diberitakan di media massa kasus-kasus yang melibatkan hubungan antara umat Islam dan Kristen di berbagai daerah, terutama gerakan Kristenisasi yang meresahkan umat Islam. merespon berbagai perkembangan tersebut, pemerintah mengambil inisiatif mengadakan Musyawarah Antar Agama (MAA) pada tanggal 30 Nopember 1967. Musyawarah itu diawali dengan pidato Pejabat Presiden Soeharto (Riyanto, 2021: 104). Presiden Soeharto (Presiden RI Periode 12 Maret 1967 s / d 21 Mei 1998) dalam sambutannya menyatakan:

“Secara jujur dan hati terbuka, kita harus berani mengakui, bahwa Musyawarah Antar Agama ini justru diadakan oleh karena timbul berbagai gejala di beberapa

daerah yang mengarah pada pertentangan-pertentangan agama. Pemerintah memang sangat berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap gejala-gejala itu, yang sedara lahiriah memang bersifat lokal dan bersumber dari salah satu pengertian. Bahkan mungkin telah pula sengaja ditimbulkan oleh kegiatan politik sisa-sisa G30S/PKI merencanakan memecah belah persatuan kita dengan mengadu domba antar suku, antar golongan, dan antar agama. Akan tetapi dipihak lain, pemerintah sungguh-sungguh merasa prihatin yang sangat mendalam. Sebab bila masalah tersebut tidak segera kita pecahkan bersama secara tepat, maka gejalagejala tersebut akan menjalar kemana-mana yang dapat menjadi masalah nasional. Bahkan mungkin bukan sekedar nasional, melainkan dapat mengakibatkan bencana nasional.”

Urgensitas hubungan diselenggarakannya Musyawarah Antar Umat Beragama (MAUB) tersebut karena saat itu bangsa Indonesia mengalami ketegangan antar berbagai penganut agama di beberapa daerah (khususnya antara Islam dan Kristen), yang jika tidak segera diatasi akan dapat membahayakan persatuan Bangsa Indonesia. Musyawarah tersebut merupakan pertemuan awal antara pemimpin agama atau pemuka berbagai agama di Indonesia dalam rangka membahas masalah-masalah mendasar dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia.

*Kesembilan, FKUB Sebagai Forum Kerjasama Antar Umat Bearagama*

(Ruhana, 2009 : 80-90). Tulisan makalah dalam sebuah jurnal terkenal ini menjelaskan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Seperti diketahui, dalam PBM 2006 tersebut dijelaskan tentang tugas dan fungsi FKUB. Misalnya, dalam konteks keanggotaan, FKUB beranggotakan pemuka agama setempat, dan dibentuk oleh masyarakat (Pasal 8). Sementara itu, pemuka agama sendiri didefinisikan dengan tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan (Pasal 1 butir 5). Dengan demikian, peran FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat

beragama sejatinya adalah peran masyarakat secara lebih luas dan terdepan dalam pemeliharaan kerukunan. Peran masyarakat yang lebih besar ini bukanlah sebagai bentuk pemberian partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di era reformasi yang mendambakan civil society yang kuat.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **1. Pola Komunikasi**

James W. Carey (1992) menyebutkan bahwa komunikasi merupakan kegiatan berbagi, berpartisipasi, dan memiliki keyakinan yang sama atas nilai-nilai tertentu. Para pengikut aliran konvergensi menekankan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam komunikasi bukanlah berpusat pada pemindahan informasi, melainkan lebih mengutamakan dimensi berbagi mengenai budaya bersama. Karena itulah pola komunikasi diantara partisipan dalam sebuah komunikasi menjadi aspek sangat penting. Mengutip pendapat Katz et.al. (2004) bahwa hubungan yang terjadi di antara partisipan mendeskripsikan pola komunikasi dan interaksi yang muncul di antara partisipan komunikasi. Pola-pola tersebut terbentuk sebagai implikasi dari ikatan hubungan komunikasi (siapa memberi

informasi kepada siapa), ikatan formal (siapa melapor kepada siapa), ikatan afektif (siapa mempercayai siapa), dan ikatan kedekatan.

## 2. Moderasi Agama

Manusia adalah makhluk sosial, atau dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Ketika akan bersosialisasi di masyarakat luas, manusia dituntut untuk menurunkan egonya agar dirinya dapat diterima di masyarakat luas dan terciptanya keharmonisan sosial di lingkungan tersebut.

### a. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan juga berarti penguasaan diri (dari kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman. Dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem (Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 2019: 15). Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak) (Kamus digital Bahasa Inggris Indonesia, 2020). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara (Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 2019:16).

Sedangkan dalam bahasa Arab moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pun kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah diantara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata ‘wasit’ yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, perantara (misalnya

dalam perdagangan, bisnis); 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih dan 3) pemimpin di pertandingan.

## **b. Prinsip Dasar Moderasi Beragama**

Prinsip dasar moderasi beragama terdapat beberapa prinsip. Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan diantara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas (Kementrian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 2019 : 19).

Dalam KBBI, kata “adil” diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Kata “*wasit*” yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran. Prinsip keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.

Mohammad Hashim Kamall (2015) menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasayhiyah*) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamall *weasathiyah* merupakan aspek penting dalam Islam yang acapkali dilupakan oleh umatnya, padahal, *wasathiyah* merupakan esensi ajaran Islam (Kamali, 2015: 20).

## **c. Landasan Moderasi Beragama.**

Moderasi beragama dapat tercipta jika toleransi beragama berjalan baik. Moderasi beragama tidak bisa dipisahkan dengan toleransi beragama. Menurut bahasa, toleransi adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris *tolerance*. Selanjutnya kata ini dipopulerkan dalam bahasa Indonesia menjadi toleransi yang berarti sikap membiarkan lapang dada (Nuh, 1979: 199). Sedangkan menurut istilah toleransi adalah sikap menenggang (menghargai, membolehkan, membiarkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang lain atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri, misalnya agama (ideology ras dan sebagainya) (Poerdarminta, 1976 : 1084).

Toleransi menurut Webster World Dictionary “*liberty toward the opinion of other’s patience with other*” (Webster World Dictionary, 1965: 1050) artinya kurang lebih: memberikan kebebasan kepada pendapat orang lain, dan sabar terhadap orang lain. Toleransi adalah sikap membiarkan suatu pendapat, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengannya, misalnya toleransi agama atau ras (Jamrah dan M. Thalib, 1986: 20).

Dari beberapa pengertian di atas maka, toleransi umat beragama dapat diartikan sebagai: pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya, menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam mengatur dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan asas terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat (Hasyim, 1979: 66).

#### **d. Indikator Moderasi Beragama**

Moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), ia pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi.

Analogi bandul jam ini bisa lebih dijelaskan sebagai berikut: sikap keberagaman seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yakni: akal dan wahyu. Keberpihakan yang kebablasan pada akal bisa dianggap sebagai ekstrem kiri, yang tidak jarang mengakibatkan lahirnya sikap mengabaikan teks. Sebaliknya, pemahaman literal terhadap teks agama juga bisa mengakibatkan sikap konservatif, jika ia secara ekstrem hanya menerima kebenaran mutlak sebuah tafsir agama.

Seorang yang moderat berusaha mengkompromikan kedua sisi tersebut. Ia bisa bergerak ke kiri memanfaatkan akalnya, tapi tidak diam ekstrem ditempatnya. Ia berayun ke kanan untuk berpedoman pada teks, dengan tetap memahami konteksnya. Lalu apa indikator moderasi beragama itu? Kita bisa merumuskan sebnayak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. Namun, untuk kepentingan buku ini, indikator moderasi beragama yang digunakan mengacu pada pedoman dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku *Moderasi Beragama* (2019, 43) yang mencakup: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode meliputi cara pandang dan prinsip berpikir mengenai masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan, dan prosedur ilmiah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta untuk menarik kesimpulan (Pawito, 2008 : 83). Metode penelitian dibutuhkan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan menghasilkan penjelasan yang lebih akurat.

##### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif dengan menggunakan

metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2009 : 1), metode penelitian kualitatif adalah: metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Alasan peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin meneliti bagaimana penerapan komunikasi Islam dalam moderasi beragama di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah. Hal tersebut digali secara mendalam dan akan dijelaskan secara komprehensif.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan (Idrus, 2009: 91). Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena dianggap paling sesuai dengan tema penelitian yang diangkat, karena peneliti mempunyai pertimbangan tertentu untuk menentukan informan penelitiannya (Sugiyono, 2009: 53).

Subyek di penelitian ini adalah Pejabat Kemenag RI di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah dan tokoh-tokoh agama di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda-beda. Kriteria dalam penelitian ini informan adalah Pejabat Stuktural Kemenag RI di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah dan tokoh-tokoh agama Islam, masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah yang beragama Islam, LSM, Perguruan Tinggi Islam dan *stakeholders* dari Kemenag RI Propinsi DIY.

Adapun objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa dan bagaimana yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktifitas (*activity*) orang-orang yang ada pada tempat tertentu (Sugiyono, 2009 : 215). Obyek penelitian ini adalah pola



komunikasi pengarusutamaan moderasi beragama di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah, ada dua jenis data yaitu data yang berwujud data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi dan data skunder yang merupakan data pelengkap dari hasil dokumentasi (Moleong, 2010 : 155).

Adapun penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan obyek penelitian dengan cara komunikasi *face to face* dengan pihak yang bersangkutan. Metode wawancara adalah sebuah proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu kontak langsung antara pencari informasi dan sumber informasi.

Kemudian semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dikumpulkan, dirangkum, dan dianalisis yang kemudian menjadi sebuah deskripsi tentang hasil penelitian.

#### **b. Observasi**

Observasi yang peneliti lakukan adalah pada pelaksanaan programprogram Kemenag RI di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah dan pada masyarakat langsung, seperti penyuluhan Agama Islam, seminar-seminar, workshop-workshop dan program lain yang terkait dengan pelaksanaan moderasi beragama.

#### **c. Dokumentasi**

Pengumpulan data yang diambil dari berbagai informasi tertulis yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan, seperti foto,surat, pemberitaan maupun berkas-berkas lainnya yang terkait.

#### **d. Focus Group Discussion**

Untuk mengkonfirmasi data observasi dan wawancara mendalam, studi ini juga menggunakan *focus group discussion* (Dawson, 1993; Krueger, 2000). Pertanyaan berfokus pada persoalan bagaimana pola-pola komunikasi yang dilakukan dalam rangka pengarus-utamaan program moderasi beragama di kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dan kabupaten Kebumen Jawa-Tengah.

### **4. Metode Analisis Data**

Data penelitian kualitatif tidak berupa angka tetapi berupa fakta yang dinyatakan dengan kalimat sebagai sebuah nilai atau kualitas. Langkah-langkah dan proses yang peneliti gunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah:

#### **a. Analisis sebelum di Lapangan**

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data skunder yang akan digunakan menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selam di lapangan. Oleh karena itu peneliti dalam membuat proposal penelitian fokusnya adalah ingin menemukan sesuatu berikut karakteristiknya.

#### **b. Analisis Data di Lapangan**

1) **Reduksi Data**, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting dan disusun secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. **Display Data** yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan dan disusun secara sistematis sehingga tersusun gambaran yang jelas dan sistematis tentang data yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan.

2) **Pengambilan kesimpulan dan verifikasi**, yaitu kegiatan penggambaran yang utuh dari objek penelitian. Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dalam satu bentuk yang dipadu pada penyajian data, melalui informasi tersebut, peneliti dapat melihat apa yang ditelitinya dan menentukan kesimpulan yang benar sebagai objek penelitian.

Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Pada tahap sebelumnya, verifikasi juga dilangsungkan untuk memeriksa keabsahan data.

## 5. Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian komunikasi kualitatif lebih menunjukkan pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh telah secara akurat mewakili realitas atau gejala yang diteliti (Moleong, 2010 : 320). Data yang merupakan hal-hal yang berkenaan dengan penelitian yang menggunakan beragam sumber data, seperti: mengumpulkan data dari kelompok, lokasi atau latar, atau waktu yang berbeda-beda sesuai dengan fakta autentik yang ada di lapangan.

Jenis triangulasi yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah jenis triangulasi yang menggabungkan dan menghubungkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Triangulasi ini menunjuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama. Hal ini berarti juga peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber dengan data sumber yang lain, kemudian peneliti akan sampai pada kemungkinan yaitu data yang diperoleh konsisten, tidak konsisten, atau malah berlawanan, dengan cara begini peneliti kemudian dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai mengenai gejala yang diteliti.

Peneliti dalam proses pengecekan dan perbandingan data penelitian ini melalui lima langkah atau alur sebagai berikut:

- a. Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan perkataan orang di depan umum dengan perkataannya secara pribadi.
- c. Membandingkan perkataan orang-orang mengenai situasi penelitian dengan perkataannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan sudut pandang seseorang dilihat dari latar belakang pendidikan, status ekonomi, dan status di masyarakat.

- e. Perbandingan antara hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pola Komunikasi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kebumen, dan berdasarkan hasil focuss group discussion dengan seluruh peserta fgd, sejumlah hampir 60 orang adalah sebagai berikut :

Menurut Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Drs. Sya'ban Nuroni, ada beberapa tantangan yang saat ini sedang dihadapi untuk mencapai moderasi beragama diantaranya adalah cara pandang, sikap atau perilaku yang ekstrem, tantangan kedua adalah

klaim kebenaran, dan tantangan berikutnya adalah mempertentangkan agama dengan Negara. Sa'ban mengatakan bahwa kerukunan adalah sebuah cita-cita atau kondisi yang sama-sama diinginkan oleh banyak pihak dan kerukunan menjadi tujuan dari adanya program prioritas dari pemerintah yaitu moderasi beragama. “Moderasi beragama sekarang sudah menjadi arus utama, tidak hanya dilakukan oleh Kemenag tapi seluruh kementerian harus memberikan materi atau nilai moderasi beragama kepada seluruh pegawai, harapannya agar tercipta kerukunan,” ujarnya.

Sa'ban mengatakan bahwa kerukunan adalah sebuah cita-cita atau kondisi yang sama-sama diinginkan oleh banyak pihak dan kerukunan menjadi tujuan dari adanya program prioritas dari pemerintah yaitu moderasi beragama. “Moderasi beragama sekarang sudah menjadi arus utama, tidak hanya dilakukan oleh Kemenag tapi seluruh kementerian harus memberikan materi atau nilai moderasi beragama kepada seluruh pegawai, harapannya agar tercipta kerukunan,” ujarnya.

Serupa dengan di Gunung Kidul, kondisi keagamaan di Kabupaten Kebumen relative kondusif, seperti yang di sampaikan Drs. H.Khamid, M. Pd. I, selaku Narasumber FGD di Kementrian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Beliau menyoroti secara umum peta radikalisme di Indonesia sbb :

Gambar 1  
Peta Potensi Radikalisme



Sumber : Drs. H. Khamid, M. Pd. I, Kepala TU Kementrian Agama Kabupaten Gunung Kidul.

Menurut Sya'ban Nuroni dan Drs. H. Khamid, M. Pd. I, dan seluruh peserta FGD, baik di Kabupaten Gunung Kidul maupun di Kabupaten Kebumen Pola Komunikasi dalam

Pengarusutamaan Moderasi Beragama sangat penting bahkan setengahnya wajib di sosialisasikan dan di implementasikan dengan materi-materi dibawah ini :

Berdasarkan hasil FGD dengan 40 an Penyuluh Agama Islam di Kemenag Gunung Kidul dan Kemenag Kebumen, diperoleh gambaran sbb bahwa pola komunikasi yang dibangun sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi. Komunikator dan Institusi resmi yang mengkomunikasikan moderasi beragama dalam mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme maupun terorisme adalah Kementrian Agama dan sebagian lembaga pendidikan.

Para Penyuluh Agama Islam di Gunung Kidul dan Kebumen lebih spesifik menjelaskan terkait bagaimana pola komunikasi pengarusutamaan moderasi beragama di Gunung Kidul dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah yakni dengan mewujudkan keharmonisan berbangsa untuk menghindari perpecahan akibat perbedaan-perbedaan yang ada, dan komunikator dalam implementasi tersebut diatas adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Lembaga Pendidikan Keagamaan yang ada di Masyarakat.

Ada juga yang menyampaikan pola komunikasi dalam implementasi moderasi beragama dengan cara wawancara dan pendekatan pola komunikasi dengan perlunya team resmi dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi moderasi beragama di Gunung Kidul dan Kebumen, sehingga lebih mudah masuk ke instansi, ormas, dan masyarakat pada umumnya melalui pemerintah desanya.

Sebagai upaya meningkatkan wawasan moderasi beragama, Kementrian Agama Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kebumen menyelenggarakan implementasi moderasi beragama, dari mulai sosialisasi program moderasi beragama sampai implementasi berupa kegiatan penyuluhan, desa moderasi beragama dan implementasi moderasi beragama yang lainnya. Selaikn sosialisasi moderasi beragama Kementrian Agama Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kebumen yang diikuti oleh para penyuluh Agama Islam, baik PNS dan non PNS se Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kebumen yang telah berlangsung, juga bekerjasama dengan LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan *focuss group discussion* tentang Pola Komunikasi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah di daerah Gunung Kidul dan Kebumen.

Hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten Gunung Kidul, Sya'ban Nuronu dan Kepala TU Kantor Kementerian Agama Kabupten Kebumen, Drs. Hamid, M. Pd, yang

keduanya menyampaikan bahwa dalam memberikan sosialisasi tersebut mengajak para peserta yang hadir untuk memahami sikap moderasi beragama. Sebab sikap ini menjadi formula ampuh dalam merespon di tengah maraknya intoleransi dan fanatisme berlebih yang bias mencabik kerukunan umat beragama. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama.

Ada 4 indikator dalam moderasi beragama yaitu Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Dalam komitmen kebangsaan, baik Sya'ban ataupun Hamid mengatakan setiap orang harus bias menjaga dan mencintai tanah air. Selanjutnya dalam hal toleransi di jelaskan bahwa para penyuluh Agama Islam harus memiliki peran penting sebagai agen moderasi beragama untuk mendiseminasikan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta didik dengan mengintegrasikan muatan moderasi beragama dalam penyuluhan ke masyarakat di Gunung Kidul dan Kebumen.

Sya'ban dan Hamid juga menyampaikan indikator moderasi beragama yang ketiga yaitu anti kekerasan. Menurut Beliau berdua tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan, oleh karena itu beliau menghimbau jika ada kejadian yang membawa isu agama agar tidak cepat mengshare sebelum ada kebenarannya.

Indikator moderasi beragama yang terakhir yaitu akomodatif terhadap budaya lokal, beliau menjelaskan keragaman suku, budaya dan bahasa bangsa Indonesia merupakan cirri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Oleh karena itu dengan perbedaan ini jangan sampai menjadi sebab kita terpecah. Junjung tinggi adat istiadat dimana kita berada sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antar kita dengan orang lain.

Hampir semua peserta fgd dari para penyuluh Agama Islam di kedua kabupaten tersebut menyampaikan pendapat yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dyah, penyuluh Agama Islam dari Kecamatan Ponjong Gunung Kidul ketika di Tanya pengetahuan tentang moderasi beragama, yakni : Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Kemudian dijawab : *Moderasi beragama yaitu tidak berlebih lebih dalam beragama, artinya di tengah tengah tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri, bisa diartikan juga berimbang.* Pertanyaan yang sama juga di sampaikan kesemua peserta fgd, kepada Bapak Kyai Fathul Muadib, penyuluh Agama Islam dari Kecamatan Ngawen Gunung Kidul, juga dijawab bahwa moderasi beragama adalah Memberikan ruang kepada mereka yang berbeda agama untuk melaksanakan peribadatnya dengan merasa nyaman.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Kyai Ismail, penyuluh Agama Islam senior di Gunung Kidul menyampaikan bahwa moderasi beragama adalah:

“Menurut saya *Moderasi beragama adalah suatu sikap untuk menghindari kekerasan, atau ekstrimisme . atau bersikap tengah-tengah*”.

Dan hampir semua peserta fgd dari penyuluh Agama Islam se Gunung Kidul menyampaikan hal senada dengan yang disampaikan Beliau bertiga.

Kemudian para peserta fgd dari para penyuluh Agama Islam se Kabupaten Kebumen juga menyampaikan hal yang sama, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Bustomi, bahwa moderasi beragama adalah Cara pandang dalam beragama secara moderat yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Senada dengan Pak Bustomi, Pak Kyai Agus dari salah satu kecamatan di Kebumen mengungkapkan bahwa moderasi beragama adalah bagaimana memahami agama dan mengamalkan ajaran agama secara moderat. Demikian juga yang di sampaikan oleh hampir seluruh peserta fgd di kedua kabupaten, baik Gunung Kidul maupun Kebumen.

Terkait pola komunikasi dalam rangka sosialisasi moderasi beragama untuk mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Dyah dari penyuluh Agama Islam Gunung Kidul menjawab : “menurut saya pola komunikasi yang ideal dengan *Pola Top Down dan Bottom Up dan siapakah komunikator atau institusi resmi yang mengkomunikasikan moderasi beragama dalam mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Kabupaten Gunung Kidul? Menurut saya ya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul*”.

*Jawaban agak berbeda di sampaikan Kyai Fathul Muadib bahwa* pola komunikasi dalam rangka sosialisasi moderasi beragama untuk mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Kabupaten Gunung Kidul dengan pola komunikasi yang inten , dan saling percaya dan komunikator atau institusi resmi yang mengkomunikasikan moderasi beragama dalam mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Kabupaten GunungKidul, dia menjawab FKUB (Forum komunikasi Umat Beragama) Gunung Kidul.

Menurut Kyai Ismail terkait pola komunikasi dalam rangka sosialisasi moderasi beragama untuk mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Kabupaten Gunung Kidul, jaabannya sama dengan Ibu Dyah yakni dengan bottom up dan top down,dan komunikator yang tepat menyampaikan moderasi beragama adalah Kementerian Agama Gunung Kidul.



Sedangkan dari hampir semua para penyuluh Agama Islam Kabupaten Kebumen menjawab senada bahwa pola komunikasi dalam rangka sosialisasi moderasi beragama untuk mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Kabupaten Kebumen sudah cukup baik tapi masih bisa ditingkatkan, dan siapakah komunikator atau institusi resmi yang mengkomunikasikan moderasi beragama dalam mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Kabupaten Kebumen? Jawab: Pemda, Kementerian Agama, FKUB dan Ormas Keagamaan.

Di akhir acara fgd tersebut beliau berdua minta agar para penyuluh Agama Islam fokus betul dalam penguatan moderasi beragama. Para penyuluh Agama Islam mendidik masyarakat tidak hanya mengamalkan ajaran Islam saja tetapi bagaimana imanya kuat dan perilakunya moderat. Dan untuk menjadi pelopor moderasi beragama maka para penyuluh Agama Islam harus mampu melahirkan agen agen moderasi beragama di masyarakat yang memiliki pandangan keagamaan yang *wasathiyah* (berada di tengah-tengah tidak condong kekiri maupun kekanan).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola Komunikasi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah bahwa pola komunikasi yang dibangun sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi.
2. Pola Komunikasi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah

3. Komunikator dan Institusi resmi yang mengkomunikasikan moderasi beragama dalam mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme maupun terorisme adalah Kementerian Agama dan sebagian lembaga pendidikan.
4. Para Penyuluh Agama Islam di Gunung Kidul dan Kebumen lebih spesifik menjelaskan terkait bagaimana pola komunikasi pengarusutamaan moderasi beragama di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah yakni dengan mewujudkan keharmonisan berbangsa untuk menghindari perpecahan akibat perbedaan perbedaan yang ada, dan komunikator dalam implementasi tersebut diatas adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Lembaga Pendidikandan Keagamaan yang ada di Masyarakat.

## **B. Saran**

Pola Komunikasi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah bahwa pola komunikasi yang dibangun perlu ditingkatkan lagi, dengan memberi banyak program kegiatan yang focus ke moderasi beragama dengan melalui beragam media sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Abd Rauf Muhammad “Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam, dalam, *Jurnal Al-Qalam* Volume 20 Edisi Khusus Desember 2014.
- Batubara, Abdul Karim, “Studi Media Dalam Perspektif Komunikasi Islam (Analisis Esensi Komunikasi Islam Dalam Diseminasi Informasi)” dalam *Proceedings AICIS* ke-12.
- Burhani, Ahmad Najib , “Al-Tawassut wa-I l’tidal: the NU and Moderatism in Indonesian Islam”, *Asian Journal of Society Science*, Vol. 40, Issue 5-6 tahun 2012.
- Carey, James W, *Communication as Culture: Essays On Media and Society, Revised Edition*. Routledge, 2008.
- Darlis, “Mengusung Moderasi Islam dalam Masyarakat Multikultural,” *Rausyan Fikr* , Vol. 13 No.2 Desember 2017.
- Dawson, S., Manderson, L., and Tallo, V.L. 1993. A manual for the use of focus group. International Nutrition Foundation for Developing Countries. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/41795> diakses 20 Oktober 2021.

- Griffin, E.A. *A First Look at Communication Theory*. 7th Edition. New York. McGrawHill, 2012.
- Hamid, Ahmad Zainul. "NU dalam Persinggungan Ideologi: Menimbang Ulang Moderasi Keislaman Nahdatul Ulama". *Afkar*, Edisi No. 21 Tahun 2007
- Hanafi, Mohd Shukri, "The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study its Implementation in Malaysia" dalam *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 4, No. 9 (1), July 2014
- Hasyim, Umar, *Toleransi Dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog Dan Kerukunan Antar Agama*, Surabaya, Pt Bina Ilmu, 1979.
- Hefni, Harjani berjudul "Perkembangan Ilmu Komunikasi Islam" pada *Jurnal Komunikasi Islam* | ISBN 2088-6314 | Volume 04, Nomor 02, Desember 2014.
- Hilmy, Masdar, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamantion on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU, "  
*Journal of Indonesia Islam*, Volume 07, Number 01, June 2013.
- <https://tirto.id/intoleransi-di-yogyakarta-meningkat-5-tahun-terakhir-kata-setara-emi>  
g, diakses 01 Desember 2020 pukul 20.10 wib
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Islami, Dian Ismi, "Konsep Komunikasi Islam Dalam Sudut Pandang Formula Komunikasi Efektif", *jurnal Wacana* Volume XII No.1, Februari 2013.
- Jamrah, Suryan A. dan M. Thalib, *Toleransi Beragama Dalam Islam*, Yogyakarta : Pd Hidayat, 1986.
- Kamali, Mohammad Hasyim, *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah*, Oxford University Press, 2015.
- Kamus digital Bahasa Inggris Indonesia, 2020.
- Katz, N., Lazer, D., Arrow, H. and Contractor, N, Network Theory and Small Group. *Small Group Research*. (Online) 35 (3), 307-332. Doi: 10.1177/1046496404264941, 2004.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Krueger, R.A. dan Casey, M.A. 2000. *Focus Group: A Practical Guide for Applied Research*, 3rd edn. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Kuntowijoyo, *al-Qur'an sebagai Paradigma*, cet. ke-7, Jakarta: Mizan, 1996.
- Mantu, Rahman , Lembaga Interfaith di Indonesia : Studi Kritis Pendekatan Formalistik Negara Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama, dalam *jurnal Aqlam, Journal of Islam and Plurality*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.

- Moleong, J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mudjiono, “Strategi Komunikasi Sebagai Penunjang Dakwah”, dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 1, April, (2001), 9-14.
- Musyafak, Najahan dan Hasan Asy’ari Ulama’i, *Agama dan Ujaran Kebencian Potret Komunikasi Politik Masyarakat*, cetakan pertama, Semarang: CV Lawwana, 2020.
- Musyafak, Najahan dan Lulu Choirun Nisa, *Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme, Aksi Damai dalam Konflik Agama*, cetakan pertama, Semarang : CV Lawwana, 2020.
- Nuh, Abdul, *Kamus Baru*, Jakarta: Pustaka Islam, 1979.
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Rakhmat Jalaluddin, “Prinsip-prinsip Komunikasi Menurut al-Qur’an”, dalam *Jurnal Audienta: Jurnal Komunikasi*, 1994.
- Riyanto, W. Fajar, *Komunikasi Islam(i); Perspektif Integrasi-Interkoneksi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga dan Galuh Patria, 2011.
- Riyanto, Waryani Fajar, “Komunikasi Verbalistik Qur’anik: Perspektif Tafsir Tematik”, dalam *Jurnal Profetik: Jurnal Komunikasi*, Vol. 02 / No. 02 / Oktober (2009), 152174.
- Riyanto, Waryani Fajar, *Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia : 1946 - 2021, Sejarah Pusat kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementrian Agama RI* (Jakarta : Pusat Kerukunan Umat Beragama {PKUB}, 2021.
- Ruhana, Akmal Salim, FKUB Sebagai Forum Kerjasama Antar Umat Beragama, dalam *Harmoni: Jurnal Multukultural dan Multireligius*, Volume VIII Nomor 30, AprilJuni 2009
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syahputra, Iswandi, *Komunikasi Profetik: Konsep dan Pendekatan*, cet. ke-1, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- Tap, S. Nakhon, Report of The Study on Pattern of Process in Promoting Teacher and School Participation for Prevention and Solution of Problems Concerning Child Labor in Thailand. *Journal of Research of Humanities Information Study* . Office of the National Education Commission, 1996.
- Yanti, Fitri, “Pola Komunikasi Islam Terhadap Tradisi Heterodoks (Studi Kasus Tradisi Ruwatan)” pada jurnal Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013.
- Webster World Dictionary, (New York, Publisher, 1965).

## **LAMPIRAN**

1. Contoh pertanyaan dan jawaban focuss group discussion (fgd) para peserta dari para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Gunung Kidul dan Kebumen.

### **DAFTAR PERTANYAAN**

#### **PENGARUS-UTAMAAN MODERASI BERAGAMA DI GUNUNG KIDUL DIY**

Jawab/isilah pertanyaan/ Pernyataan di bawah ini sesuai dengan yang bapak/ibu ketahui, rasakan, ataupun alami. Tidak ada jawaban yang salah, karena itu mohon jawab seadanya.

##### **A. Daftar Pertanyaan**

1. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama?

Jawab : *Moderasi beragama yaitu tidak berlebih lebih dalam beragama, artinya di tengah tengah tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri, bisa diartikan juga berimbang.*

2. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah kasus-kasus konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Kabupaten Gunung Kidul?

Jawab : *Ada*

3. Menurut bapak/ibu, latar belakang apa yang menimbulkan kasus-kasus konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Gunung Kidul?

Jawab: *Berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik*

4. Menurut bapak/ibu, bagaimanakah implementasi moderasi beragama dalam mencegah kasus konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Kabupaten Gunung Kidul?

Jawab: *Moderasi beragama sebagai perekat antara semangat beragama dan komitmen bermasyarakat dan berbangsa .*

5. Menurut bapak/ibu, apakah ada sosialisasi, institutionalisasi, dan evaluasi tentang implementasi moderasi beragama untuk mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Kabupaten Gunung Kidul.

Jawab: *ada*

6. Jika iya, bagaimana sosialisasi moderasi beragama dalam mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme dilakukan di Gunung Kidul?

Jawab: *Kantor kemtrian agama kabupaten gunungkidul melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung.*

7. Bagaimana institusionalisasi moderasi beragama dalam mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme dilakukan di Gunung Kidul?

Jawab: *Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya mengedukasi masyarakat bagaimana cara pengamalan ajaran agama yang moderat, yaitu dengan pendidikan toleransi dan pengakuan terhadap segala bentuk perbedaan yang ada, memperkuat keimanan dan ketaqwaan dari ajaran tiap kepercayaan.*

8. Bagaimana evaluasi moderasi beragama dalam mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme dilakukan di Gunung Kidul?

Jawab: *Dengan Mengacu Pada 4 Indikator Moderasi Beragama.*

9. Menurut bapak/ibu, apakah implementasi moderasi beragama dalam mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme tersebut sudah berjalan efektif?

Jawab: *Sudah , Hanya Belum Maksimal*

10. Sepengetahuan bapak/ibu, bagaimana pola komunikasi dalam rangka sosialisasi moderasi beragama untuk mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Kabupaten Gunung Kidul ?

Jawab: *Dengan Pola Top Down dan Bottom Up.*

11. Siapakah komunikator atau institusi resmi yang mengkomunikasikan moderasi beragama dalam mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Kabupaten Gunung Kidul?

Jawab: *Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul,*

12. Apakah pesan utama yang disampaikan ke masyarakat oleh lembaga tersebut berdasarkan indikator moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap kearifan lokal?

Jawab: *Mengedukasi masyarakat bagaimana cara pengamalan ajaran agama yang moderat, yaitu dengan pendidikan toleransi dan pengakuan terhadap segala bentuk perbedaan yang ada, memperkuat keimanan dan ketaqwaan dari ajaran tiap kepercayaan.*

13. Siapakah komunitas yang dituju dalam implementasi moderasi beragama untuk mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Gunung Kidul?

Jawab: *Jamaah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.*

14. Media apa saja yang digunakan dalam sosialisasi implementasi moderasi beragama untuk mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Gunung Kidul?

Jawab: *Media Online Dan Offline*

15. Apa saja hambatan dalam implementasi moderasi beragama untuk mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Gunung Kidul

Jawab: *Kepentingan Subyektif Dari Individu Maupun Golongan Yang Bersifat Politik Dan Ekonomi.*

16. Bagaimanakah umpan balik komunitas/masyarakat sasaran implementasi moderasi beragama dalam mencegah konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Gunung Kidul?

Jawab: *Terselenggaranya kegiatan bersama dalam upaya penguatan kerukunan umat beragama.*

17. Tulislah angka dibelakang daftar media berikut ini berdasarkan prioritas/ yang paling sering bapak/ibu akses untuk memperoleh informasi tentang moderasi beragama

*(Contoh : Radio 1; Media Sosial 2; Komunikasi antar pribadi 3)*

a. Koran

d. Internet/Web/Blog (1)

b. TV

e. Media Sosial (2)

c. Radio

f. Komunikasi antar pribadi (3)

18. Kepada siapa saja bapak/ibu meminta informasi berkaitan dengan persoalan moderasi beragama? Sebut 3 nama

a. *Bp. Drs. H. Sya'ban Nuroni MA. Pekerjaan/jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.*



- b. Bp. Zuhdan Aris, Sag. MA. Pekerjaan/jabata Kasi bimas islam Kan kemenag Gunungkidul.
  - c. Bp. Endra muhadi , S.sos, MA Pekerjaan/jabatan Kepala KUA kapanewon Nglipar.
19. Siapa saja yang pernah bertanya/berkonultasi kepada bapak/ibu berkaitan dengan persoalan moderasi beragama? Sebut 3 nama
- d. Bp. Sukar Pekerjaan/jabatan Takmir masjid
  - e. Bu tutik Pekerjaan/jabatan ketua majelis ta'lim al mudzakaroh
  - f. Intan rohmawati Pekerjaan/jabatan ketua remaja islam masjid nururrohman
20. Saran/kritik/usulan terkait persoalan moderasi beragama sebagai cara meminimalisir persoalan konservatisme, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme ataupun terorisme di Gunung Kidul
- Jawab: Sebaiknya ada formula atau cara yang lebih efektif dalam upaya sosialisasi moderasi beragama kepada golongan masyarakat berpendidikan rendah.

2.Materi narasumber, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gunung Kidul dan Kepala TU Kementrian Agama Kabupaten Kebumen

Implementasi.ME.pptx - PowerPoint

FILE HOME INSERT DESIGN TRANSITIONS ANIMATIONS SLIDESHOW REVIEW VIEW

Cut Copy Paste Format Painter New Slide Section Layout Reset Section Font Paragraph Drawing Shape Fill Shape Outline Shape Effects Find Replace Select

1

2

3

4

5

6

Click to add notes

# IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Oleh  
Drs. H. Sa'ban Nuroni, MA

SLIDE 01 OF 39

7:21 AM 12/30/2022

Implementasi.ME.pptx - PowerPoint

FILE HOME INSERT DESIGN TRANSITIONS ANIMATIONS SLIDESHOW REVIEW VIEW

Cut Copy Paste Format Painter New Slide Section Layout Reset Section Font Paragraph Drawing Shape Fill Shape Outline Shape Effects Find Replace Select

35

36

37

38

39

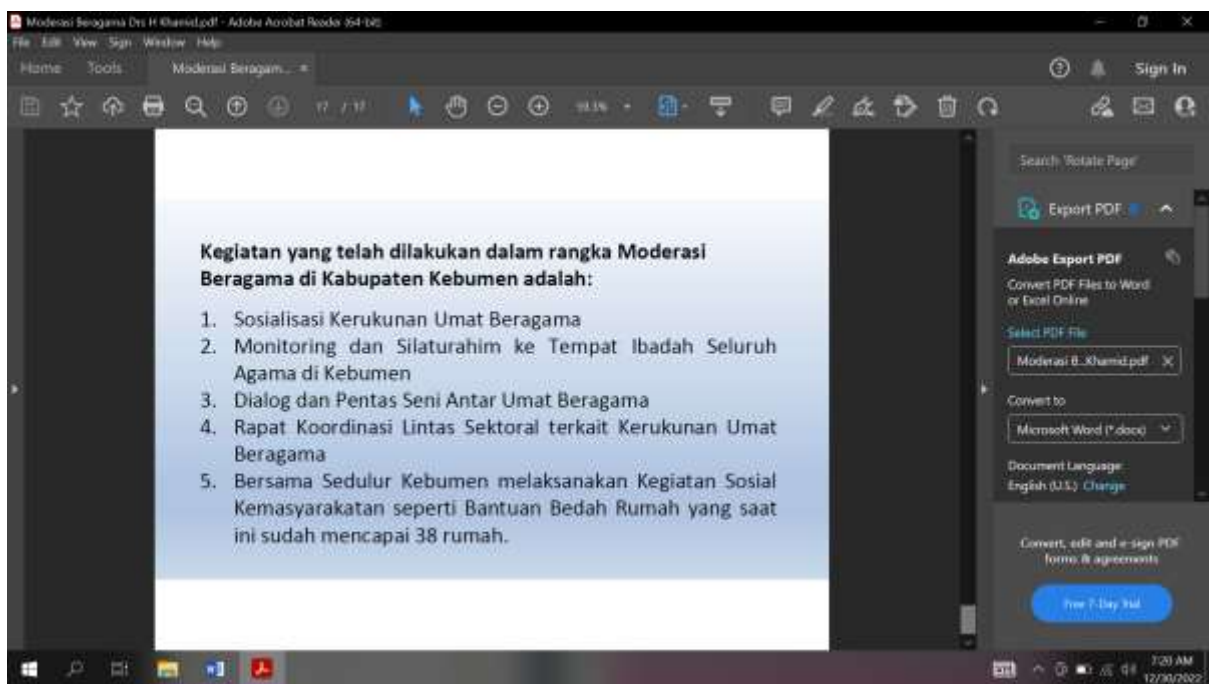
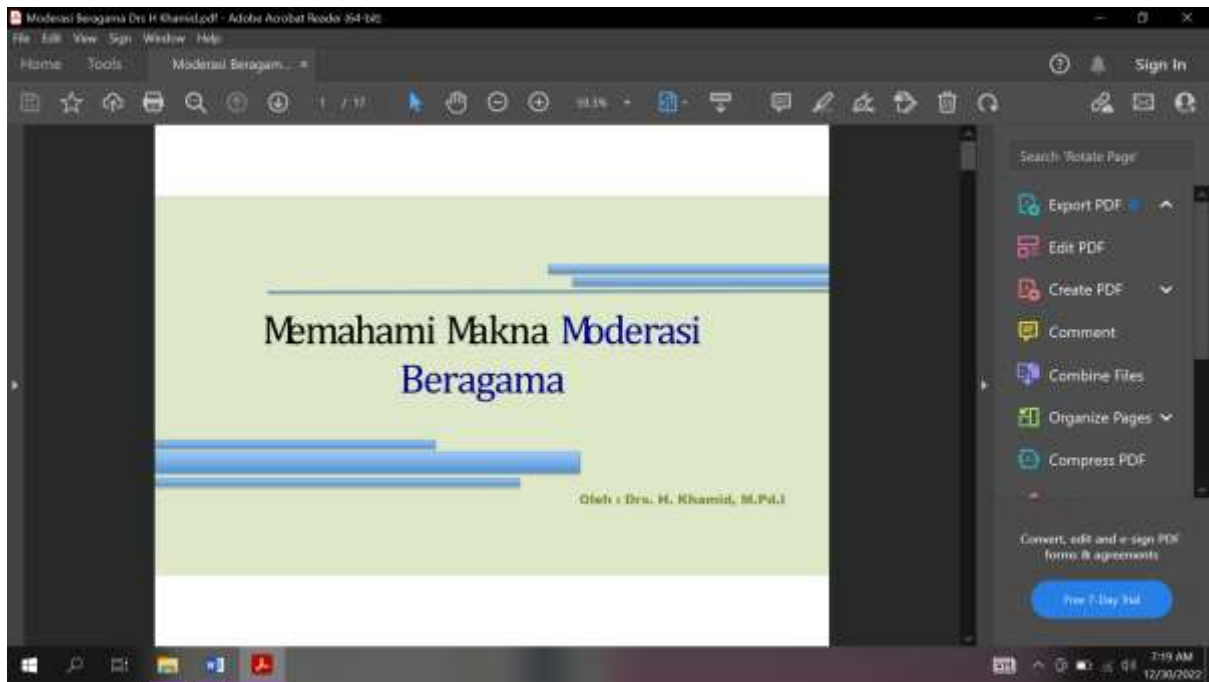
Click to add notes

## SEMBILAN NILAI MODERASI BERAGAMA

- 1 > *Rahamutiyah* (kasih sayang tanpa padang)
- 2 > *Insaniyah*
- 3 > *'Adliyyah*
- 4 > *Mubadalah* (kesalingan)
- 5 > *Maslahah*
- 6 > *Mu'ahadah wathaniyah* (ikatan kebangsaan)
- 7 > *Dusturiyah*
- 8 > *Tasamuhiyah*
- 9 > *'Urfiyah*

SLIDE 36 OF 39

7:22 AM 12/30/2022



## FOTO – FOTO KEGIATAN DI GUNUNG KIDUL

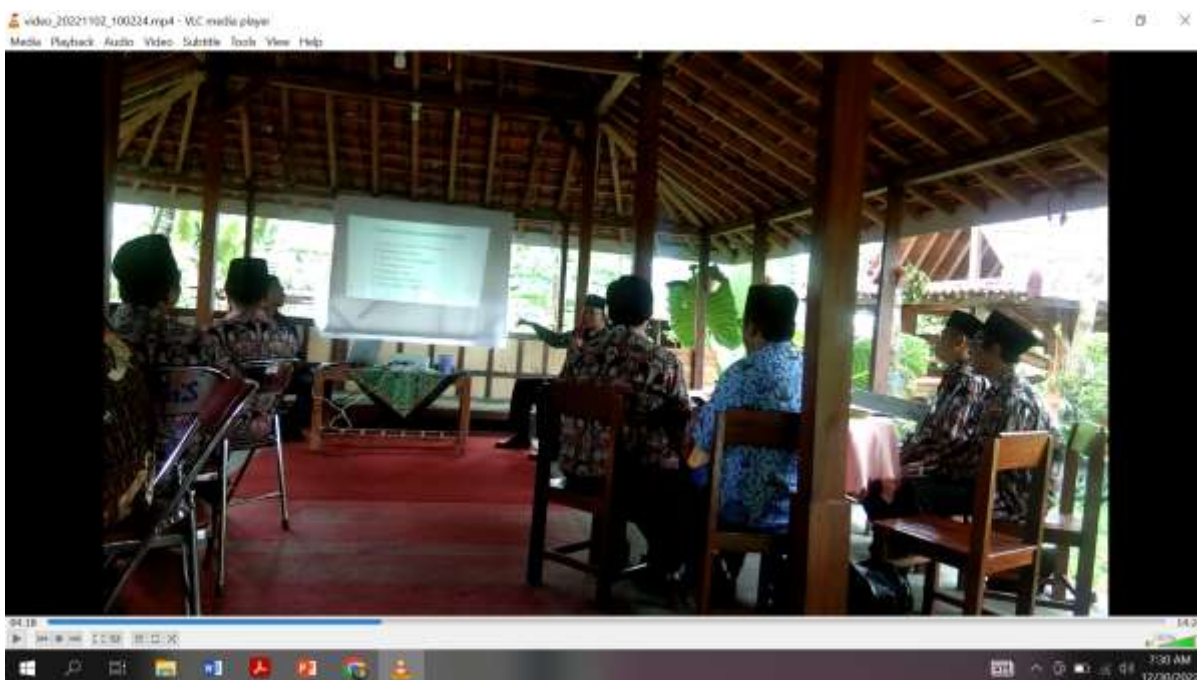


Foto – Foto Kegiatan di Kabupaten Kebumen



